

## WACANA PENJARAHAN DAN KEKERASAN SIMBOLIK TERHADAP PETANI

Oleh: Agus Sudibyo\*

*Perlawanan kaum petani sudah lama terjadi dalam konteks sejarah hubungan antara si kaya dan si miskin dan antara kaum petani dan negara. Persoalannya selalu bahwa negara, aparat keamanan dan pemilik modal telah mengambil alih secara paksa surplus ekonomi dari petani. Mereka bekerja sama dalam aksi penyerobotan tanah petani, pendirian perkebunan-perkebunan dan dalam menghadapi gerakan protes petani. Negara bukan hanya menghadapi gerakan perlawanan petani dengan represi-represi fisik. Secara sistematis negara juga melakukan propaganda dengan menciptakan gambaran-gambaran yang unfavourable tentang petani pelaku penjarahan dalam berbagai representasi wacana. Dalam batas tertentu, media massa justru memperkuat kecenderungan ini dengan menonjolkan dimensi kekerasan, pemberontakan dan anakhisme dalam mewacanakan aksi-aksi penjarahan petani.*

Beberapa waktu lalu, ada sebuah berita tentang aksi penjarahan yang sedang semarak di Jawa Timur yang membuat masyarakat terkesima. Di Malang Selatan, sekelompok petani menebangi pohon-pohon kakau yang siap panen di lahan perkebunan yang mereka klaim sebagai tanah mereka, lalu menggantikannya dengan tanaman jagung. Tindakan ini banyak dinilai sebagai tindakan yang konyol dan naif. Sebab tanaman jagung sungguh tak sebanding nilainya dengan tanaman kakao. Hampir semua orang maklum bahwa kakau adalah komoditi mahal dan menjadi primadona ekspor. Lebih mengherankan lagi, para petani itu ternyata membiarkan buah kakau yang mereka tebangi berserakan ditempatnya alias tidak memungutinya.

---

\* Alumnus jurusan Ilmu Komunikasi Fisipol, Universitas Gadjah Mada.

Dapatkah penilaian ini dibenarkan begitu saja? Sosiolog Hotman Siahaan menganalisis dengan kaca mata yang lain. Ia melihat fenomena itu sebagai bentuk perlawanan simbolik petani untuk menuntut dan menegakkan subsistensi mereka sebagai masyarakat bawah, sebagai petani. (*lihat artikel Hotman M. Siahaan, "Anarki" Sebagai Upaya Mempertahankan Subsistensi di Pedesaan*) Tanaman jagung sangat identik dengan kehidupan petani karena secara turun-temurun tanaman inilah makanan pokok mereka. Terbentuk semacam "fanatisme" terhadap tanaman jagung dan pada saat-saat tertentu mereka akan menggunakan jagung sebagai simbolisasi eksistensi, status dan aspirasi mereka. Sedangkan kakau, betapa-pun mahal harganya dan betapapun sebenarnya sangat "akrab" dengan hidup sehari-hari mereka, tidak bermakna positif terhadap kesejahteraan hidup mereka. Dalam skema interpretasi para petani itu, kakao bahkan mungkin telah identik dengan negara dan para kolega swastanya yang telah lama menjarah tanah dan merusak stabilitas perekonomian mereka.

Tulisan ini ingin mendiskusikan eskalasi penjarahan dan protes petani yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia beberapa waktu yang lalu dan gambaran-gambaran yang dimunculkan dalam wacana negara dan wacana media. Sejauh manakah penderitaan dan ketidakberdayaan kaum petani itu sehingga mereka berani menggunakan jubah kolektif untuk melakukan berbagai gerakan perlawanan sosial? Secara historis, faktor-faktor apa yang menjadi latar belakang gerakan-gerakan ini? Bagaimana kecenderungan negara dalam mewacanakannya? Gambaran yang bagaimanakah yang mendominasi pemberitaan media terhadap aksi-aksi penjarahan yang dilakukan kaum petani ?

### Ironisme Nasib Petani

Tidak dapat disangkal bahwa kondisi kaum petani di Indonesia belakangan ini benar-benar menyedihkan. Berbagai persoalan bertubi-tubi menghampiri mereka. Persoalan hama yang selalu muncul setiap saat, harga hasil-hasil pertanian yang sering dipermainkan para spekulan pasar, penyerobotan tanah untuk proyek-proyek tertentu, faktor alam yang acap kali kurang bersahabat dan masih banyak lagi. Contoh faktor alam yang dimaksud adalah gejala *elnino* yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Gejala alam *elnino* ditandai

dengan datangnya musim kemarau yang sangat panjang dan seperti yang telah terjadi hal ini menyebabkan kegagalan panen di mana-mana.

Kegagalan panen akibat gejala alam *elnino* praktis menurunkan stabilitas ekonomi kaum petani. Namun penderitaan petani tidak berhenti di sini. Tak lama berselang, terjadi krisis ekonomi yang dampaknya menembus semua lapisan sosial, tanpa terkecuali lapisan petani pedesaan. Bagian terbesar dari petani adalah buruh tani atau petani penggarap yang dalam kondisi normal pun hidup secara *pas-pasan*. Mereka umumnya tidak mempunyai cadangan pangan yang berlebih yang dapat dialokasikan untuk mengatasi peningkatan biaya hidup akibat krisis moneter.

Nasib petani semakin terpuruk ketika beberapa waktu lalu pupuk tiba-tiba menghilang dari pasaran sedangkan musim tanam telah tiba. Kalaupun ada pupuk di pasaran, harganya melambung tinggi dan tak terjangkau oleh mayoritas petani. Untuk menopang biaya hidup sehari-hari saja mereka kesulitan, apalagi untuk membeli pupuk yang harganya sudah tak realistis itu. Tak pelak, gagal panen kemungkinan besar terjadi dan ini berarti kelangsungan hidup mayoritas petani dalam kondisi terancam. Sebab mereka umumnya tidak mempunyai cadangan makanan yang berlebih dan kehidupannya benar-benar sangat tergantung dari hasil bercocok tanam dari musim ke musim.

Bagaimanakah sebenarnya fenomena kelangkaan pupuk bisa terjadi? Dalam suatu wawancara dengan *SCTV*, pakar pertanian, H.S. Dillon, menyimpulkan bahwa kelangkaan pupuk terjadi karena pemerintah tidak mempersiapkan program pertanian yang kondusif untuk melindungi kepentingan petani kecil. Akan halnya kebijakan penghapusan subsidi pupuk yang dikeluarkan pemerintah sebagai reaksi terhadap fenomena kelangkaan pupuk, semakin menunjukkan betapa tidak adilnya perlakuan pemerintah terhadap petani. Menanggapi kebijakan ini, Guru Besar IPB, Prof. Bungaran Saragih, menyatakan, "Secara makro kebijakan itu juga sangat menganaktirikan petani, dan karena itu dipertanyakan pula nurani pemerintah pada petani". Dalam hal ini, Prof. Saragih membandingkan subsidi pupuk yang hanya sebesar Rp. 2,1 trilyun dengan suntikan dana sebesar Rp. 257 trilyun yang diberikan Pemerintah kepada industri perbankan.<sup>1</sup> Ketidakberdayaan dan ketidakadilan tampak menjadi warna dominan dalam realitas kehidupan

<sup>1</sup> *Kompas*, 17 Desember 1998.

kaum petani kita. Persoalannya kemudian adalah bukankah ketidakberdayaan dan ketertindasan dapat membutakan mata mereka, membikin mereka menjadi acuh tak acuh terhadap norma-norma dan tata aturan, serta pada gilirannya sangat rentan terhadap stimuli untuk melakukan tindakan-tindakan yang destruktif. Tidakkah akumulasi kekecewaan dan frustrasi akibat aneka-rupa ketidakadilan yang selama ini ditimpakan pada petani dapat berbuah tindakan-tindakan anarkhis yang kontra-produktif?

### Penjarahan Dalam Perspektif Historis

Hotman M. Siahaan pernah mensejajarkan aksi-aksi penjarahan oleh kaum petani belakangan dengan gerakan perbanditan yang pernah terjadi di era kolonial.<sup>2</sup> Gerakan perbanditan ini merupakan bentuk protes sosial petani menentang dominasi ekonomi, politik dan kultural negara yang “menindas” mereka. Selain perbanditan, protes sosial petani juga terwujud dalam gerakan “pembegalan”. Pembegalan merupakan tindakan protes petani terhadap perusahaan perkebunan yang banyak merugikan mereka. Waktu itu, Pembegalan dianggap sebagai gangguan keamanan di pedesaan, khususnya di perkebunan tebu, tembakau dan kopi.

Gerakan perbanditan ini menurut Hotman bertujuan untuk menghilangkan ketidakadilan, penekanan dan eksploitasi, merupakan resistensi terhadap kemiskinan, tekanan pajak, kerja paksa, dan tekanan sosial politik. Perbanditan juga merupakan upaya untuk mengembalikan hak milik petani yang telah diserobot penguasa. Sebagai bentuk resistensi petani, perbanditan menurut Hotman dapat dipilah menjadi tiga kelompok. Pertama, perbanditan belum sadar politik yang didominasi oleh tindakan kejahatan murni seperti pencurian, “begal”, dan sejenisnya. Kedua, perbanditan setengah sadar politik yang meliputi perampokan dan perkecuan baik secara individual maupun kelompok. Ketiga, perbanditan sadar politik yang terwujud dalam bentuk gerilya, pembunuhan, dan sejenisnya.

<sup>2</sup> Hotman M. Siahaan, “‘Anarki’ Sebagai Upaya Mempertahankan Subsistensi di Pedesaan, makalah yang disampaikan dalam *Seminar “Anarki, Represi, dan Demokrasi”* yang diadakan dalam rangka Dies Fisipol UGM, 19 September 1998.

James C. Scott (1985:241) mencatat bahwa perlawanan petani yang berupa gerakan perbanditan itu merupakan reaksi atas semakin lebarnya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin akibat meningkatnya peranan negara dalam proses transformasi pedesaan melalui proyek revolusi hijau. Perlawanan petani dimaksudkan untuk meruntuhkan hegemoni negara dan kaum kaya. Sebab dua kelompok inilah yang telah bekerja sama mengambil surplus ekonomi dan menyerobot hak-hak petani secara paksa.

Perlawanan ini diistilahkan Scott sebagai "*everyday forms of resistance*" atau perlawanan sehari-hari petani. Sebuah perlawanan yang dalam pandangan Hotman tidak sama persis dengan pemberontakan. Akan tetapi lebih tepat jika dimaknai sebagai pergulatan yang prosais namun tetap antara kaum petani dan mereka yang berusaha menghisap tenaga kerja, pangan, pajak-pajak, sewa-sewa, dan kepentingan mereka. Tujuan perlawanan ini bukan untuk menggulingkan atau mengubah sistem dominasi, melainkan lebih merupakan usaha petani untuk tetap hidup dalam sistem, menjalankan sistem demi kerugian minimal bagi dirinya.

Latar belakang aksi penjarahan oleh kaum miskin pedesaan yang terjadi diberbagai daerah belakangan ini, khususnya penjarahan di lahan-lahan perkebunan, tidak jauh berbeda dengan latar belakang perbanditan di era kolonial. Sumber persoalannya adalah komersialisasi lahan pertanian yang telah berpuluh-puluh tahun yang lalu digalakkan negara untuk meningkatkan pendapatan negara dari komoditi ekspor non-migas. Komersialisasi dan swastanisasi lahan pertanian menimbulkan persoalan yang kompleks. Pengambilalihan lahan pertanian dari petani oleh negara dengan status pengambilalihan yang tidak jelas pada akhirnya menimbulkan kesulitan bagi petani untuk mendapatkan kembali lahan pertanian itu pada saat yang telah disepakati. Para petani itu tidak berdaya dihadapkan pada dalih-dalih dan tekanan-tekanan yang diberikan oleh negara ketika mereka mencoba menuntut lahan mereka yang telah menjadi perkebunan.

Seiring dengan semaraknya momentum reformasi, semangat perlawanan terhadap hegemoni negara lahir dan berkembang di kalangan petani. Penindasan selama Orde Baru pada akhirnya menimbulkan sensibilitas di kalangan mereka. Paralel dengan pendapat Donald Zagoria (Zagoria, 1974:29) komersialisasi lahan pertanian menyebabkan petani menjadi lebih kritis dan revolusioner terhadap berbagai bentuk penghisapan yang mereka alami, dan

Yang justru berkembang dalam skema kesadaran masyarakat adalah pereduksian entitas penjarahan sebagai semata-mata manifestasi anakhisme sosial. Aksi penjarahan, dalam berbagai bentuknya, semakin lazim diapresiasi dan direkonstruksi sebagai tindakan yang patologis dan menyimpang. Penjarahan lebih sering dicerna sebagai manifestasi tindakan kriminal yang mengancam ketertiban sosial, sehingga ada pembenaran untuk menghadapinya dengan tindakan represif dan koersif. Dalam hal ini, masyarakat sebenarnya telah sedemikian terbelenggu oleh perspektif yang digunakan negara dalam melihat aksi penjarahan. Pola berpikir, asosiasi, reaksi spontan, dan idiom-idiom yang digunakan masyarakat untuk merespon aksi penjarahan mengindikasikan bahwa masyarakat telah hanyut dalam pendekatan represif dan penegakan hukum yang selalu digunakan negara dalam menghadapi anakhi sosial.

Seperti dijelaskan Samsu Rizal Panggabean (lihat artikel *Peluang Represi Sebagai Solusi Anarki*), pendekatan represif menekankan manajemen, kontrol dan dominasi dalam rangka mengatasi berbagai bentuk kerusakan sosial.<sup>3</sup> Prioritas pendekatan represif ini adalah bagaimana strategi memulihkan keamanan sesegera mungkin, dan bukannya bagaimana memecahkan problema, tuntutan dan kekecewaan yang menyebabkan suatu kerusakan. Dalam konteks ini, pandangan yang lazim mewarnai situasi pasca kerusakan adalah tindakan penangkapan, penculikan, penyiksaan dan pengkambing-hitaman pihak-pihak yang dituduh sebagai pelaku dan penggerak kerusakan. Pendekatan represif berasumsi bahwa warga negara tidak mempunyai kemampuan bernalar secara politik dan hanya dapat digerakkan oleh dorongan-dorongan impulsif yang disulut oleh pihak-pihak tertentu. Lebih tegas lagi, warga negara yang terlibat dalam aksi kerusakan dan anarkhi dianggap bukan manusia yang bernalar dan berkemampuan bertindak berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. (Charles Tilly, 1975)

Logika-logika pendekatan represif inilah yang menjadi warna dominan dalam wacana publik tentang penjarahan. Sulit disangkal bahwa konstruksi sosial yang terbentuk dalam kognisi mayoritas masyarakat saat membaca berita tentang penjarahan notabene adalah konstruksi sosial yang *illegitimate*

<sup>3</sup> Samsu Rizal Panggabean, "Peluang Represi Sebagai Solusi Anarki", makalah yang disampaikan *Seminar* "Anarki, Represi, dan Demokrasi" yang diadakan dalam rangka Dies Fisipol UGM, 19 September 1998.

dan *violent* tentang si penjarah, serta konstruksi sosial yang menempatkan aksi penjarahan itu dalam kategori kognitif yang sama dengan tindakan pencurian, perampokan. Ironisnya, preferensi utama media dalam memberitakan aksi penjarahan umumnya terletak pada dimensi konflik dan emosi yang melekat dalam aksi itu : melibatkan massa yang besar, terjadi bentrokan fisik dengan aparat keamanan, ada korban jiwa dan lain-lain. Aksi penjarahan diberitakan terutama sekali karena didalamnya terkandung unsur kontroversial dan sensasional sehingga dapat menjadi magnet untuk menarik perhatian khalayak. Meminjam istilah Rizal Panggabean, aksi penjarahan tidak diperlakukan sebagai peristiwa yang layak diperhatikan kecuali jika ditempatkan sebagai gangguan keamanan dan ketertiban yang perlu ditindak tegas.

### Delegitimasi Negara Terhadap Petani

Pendekatan keamanan secara langsung maupun tak langsung menempatkan pelaku penjarahan sebagai “musuh” negara. Persoalannya kemudian bagaimanakah rejim penguasa di Indonesia, khususnya rejim Orde Baru selama ini menundukkan musuh politiknya. Pertama-tama, rejim Orde Baru menundukkan musuh politiknya dengan cara-cara yang manifes, menggunakan mekanisme legal formal, perangkat-perangkat hukum yang manipulatif, serta represi-represi fisik yang prosedural. Atas nama keamanan dan ketertiban, penjarahan dan pemberontakan petani dihadapi dengan aparat bersenjata yang tak segan-segan menembaki rakyatnya sendiri. Atas nama penegakan hukum, kasus-kasus penjarahan, pemberontakan petani dibawa ke pengadilan di mana vonis hampir selalu dijatuhkan secara arbitrer kepada petani, seperti halnya yang terjadi pada buruh.

Namun rejim Orde Baru juga menyingkirkan musuh politiknya dengan cara-cara yang laten-simbolik. Soeharto melakukan praktek-praktek delegitimasi terhadap musuh politik dengan memproduksi dan memanipulasi wacana-wacana resmi yang difungsikan sebagai sarana produksi kebenaran “versi” negara. Representasi wacana resmi ini berupa buku teks pendidikan, surat kabar, majalah, jurnal, “buku putih” dan film yang diproduksi instansi-instansi negara. Wacana resmi negara juga tergambar dalam pernyataan para aparatnya yang terlibat dalam berbagai perdebatan di media massa. Dalam berbagai wacana resmi ini rejim Orde Baru melakukan delegitimasi simbolik

dengan menciptakan gambaran-gambaran yang *unfavourable* dan *illegitimate* tentang musuh politiknya.<sup>4</sup> Gambaran ini diciptakan dengan memanfaatkan dimensi-dimensi wacana : sintaksis, semantik, retorik, skematik, grafik dan lain-lain untuk melahirkan efek-efek tertentu.

Delegitimasi simbolik menurut Teun A. van Dijk lazim dilakukan ketika perangkat-perangkat koersif, represif, dan mekanisme legal lainnya tidak efektif untuk menetralkan wacana atau kekuatan musuh negara.<sup>5</sup> Delegitimasi ini dilakukan dengan beberapa cara.<sup>6</sup> *Pertama*, dengan memanfaatkan konteks produk, akses, dan kegunaan wacana untuk menggugat legitimasi musuh negara. Elit pemerintah sering memojokkan pemimpin, penggerak dan intelektual pendukung aksi-aksi perlawanan petani dengan merendahkan peran, latar belakang, visi, pengetahuan, konsep, dan ekspektasi-ekspektasi mereka. Orang-orang yang menggerakkan penjarahan dianggap tidak mengerti hukum, tidak memahami hak dan kewajiban dan arti penting ketertiban sosial. *Kedua*, delegitimasi simbolik dilakukan dengan penekanan simptom-simptom negatif atau destruktif pada diri pelaku penjarahan, serta penekanan terhadap ketidakselarasan aksi penjarahan dengan norma-norma sosial. Dalam hal ini sering diimplementasikan strategi *framing* yang spesifik, misalnya dengan pendeskripsian secara negatif terhadap kelompok penjarah. Negara sering mengintroduksi label anakhis, pemberontak, komunis, anti-pemerintah, pengacau keamanan dan lain-lain untuk mendiskreditkan kelompok petani atau buruh yang berusaha menegakkan eksistensi sebagai masyarakat miskin. Pemimpin aksi penjarahan diberi label *dalang*, sedangkan aktivis kampus atau LSM yang mendampingi aksi-aksi petani diberi label provokator, aktor intelektual, pahlawan kesiangkan, antek komunis, dan sebagainya. *Ketiga*, delegitimasi simbolik juga dilakukan dengan memanfaatkan tokoh yang otoritatif dan *legitimate* untuk membuat klarifikasi, evaluasi moral dan dakwaan-dakwaan terhadap kelompok penjarah. Pemuka adat, pemuka agama

<sup>4</sup> Soeharto memberi cap negatif pada kelompok-kelompok kritis mahasiswa/intelektual dengan mengenalkan label-label kelompok kekiri-kirian, OTB, kelompok anti kemapanan, agen asing, kelompok radikal; mengasosiasikannya dengan komunisme atau Marxisme; dan menggambarkannya sebagai pengancam integrasi nasional. Cap yang senada juga diciptakan untuk kelompok-kelompok masyarakat yang berusaha memisahkan diri dari pemerintah pusat, dengan memperkenalkan label GPK (gerakan pengacau keamanan), kelompok ekstrem, kelompok disintegrasi, dan lain-lain.

<sup>5</sup> Teun A. van Dijk, "Legitimacy," dalam *Ideology: A Multidisciplinary Study* (London: Sage, 1998, in Press), hal. 6.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal. 6-7.



dan tokoh struktural yang berwibawa didesak untuk membuat statemen-statemen yang membenturkan aksi penjarahan dengan nilai-nilai agama, adat dan hukum. Mereka ditekan untuk memberikan berbagai pembenaran terhadap stigma-stigma yang telah dilekatkan negara kepada petani yang melakukan penjarahan. Hal ini sering terjadi tanpa memperdulikan dinamika sosiologis-historis yang melatar-belakangi aksi penjarahan.

Delegitimasi simbolik bukan hanya menghasilkan *establishment* suatu kekuasaan, tetapi juga dapat merefleksikan praktek dominasi dan penyalahgunaan kekuasaan.<sup>7</sup> Wacana penjarahan versi negara menjadi dominan dan *legitimate* karena negara memanfaatkan institusi atau individu yang mempunyai otoritas dan *prestise* seperti militer, Badan Pertanahan Nasional, Departemen Pertanian, Departemen Kehutanan, pusat-pusat riset dan pakar perguruan tinggi. Pernyataan-pernyataan mereka ini sering diasosiasikan dengan kebenaran. Dengan kata lain, negara menguasai akses tunggal terhadap sumber-sumber simbolik yang disebut sebagai pengetahuan otoritatif dan pemikiran otoritatif.<sup>8</sup> Tidak adanya fakta, tafsir dan wacana tandingan dari petani dan kelompok sosial lain akan menghasilkan efek *self-legitimizing* bagi wacana negara tentang penjarahan.

### Memberdayakan Wacana Tandingan

Berdasarkan paparan di atas, perlu dikembangkan wacana tandingan tentang aksi penjarahan petani. Meminjam terminologi Foucault, perlu diberdayakan pengetahuan-pengetahuan tertindas, yaitu blok-blok pengetahuan historis yang pernah ada tapi disembunyikan demi tegaknya suatu bangunan teori yang sistematis dan fungsional. Pengetahuan tertindas juga meliputi pengetahuan naif, yang berada dalam posisi hirarkhis terbawah, yang dianggap tidak memenuhi kriteria keilmuan. Michel Foucault memberi contoh pengetahuan tertindas dengan pengetahuan penderita penyakit jiwa, orang sakit, dan pengetahuan-pengetahuan marginal lain ; pengetahuan populer (*le savoir des gens*)<sup>9</sup> yang bersifat lokal, khas, atau regional ; serta pengetahuan yang nyleneh

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 8.

<sup>9</sup> Pengetahuan populer sering dipertentangkan dengan pengetahuan *common sense*.

yang tidak dapat diterima semua orang dan yang menjadi kuat justru karena mendapat tantangan dari segala arah.<sup>10</sup>

Perlu dikembangkan sikap apresiatif dan aspiratif terhadap pengetahuan-pengetahuan tandingan yang dimiliki dan dipegang teguh kaum miskin yang terlibat dalam aksi penjarahan. Pengetahuan yang tercermin dari kepolosan, kesahajaan dan kenaifan petani miskin yang lebih menghargai jagung daripada kakao. Pengetahuan yang tersirat dari kekerasan hati petani bahwa secara historis mereka berhak atas lahan yang saat ini menjadi perkebunan di sekitar tempat tinggalnya. Pengetahuan yang lahir dari kelompok sosial yang justru semakin tertinggal dan ternafikan di jaman yang gegap-gempita oleh slogan dan klaim-klaim keberhasilan pembangunan.

Ada sejumlah pertanyaan yang menggelitik kesadaran dan daya kritis kita. Mengapa kaum miskin begitu antusias dan dengan tanpa rasa bersalah menebangi tanaman perkebunan, menjarah tambak, penggilingan padi dan peternakan ayam? Bukankah tindakan nekat ini merupakan akumulasi dari kekecewaan mereka terhadap pemilik peternakan yang ingkar janji untuk menjadikan warga setempat sebagai karyawan perternakannya, terhadap pemilik perkebunan yang tidak mengembalikan tanah petani sesuai dengan perjanjian, serta terhadap perusahaan penggilingan padi yang sengaja menimbun beras di kala beras sulit didapatkan? Mengapa para petani yang menyerbu perkebunan kakao tidak mengambil buah kakao yang mereka tebangi, walaupun mereka sadar betapa tingginya nilai jual kakao?

Realitas yang juga perlu dikritisi adalah keberanian petani untuk berkonfrontasi dengan aparat keamanan. Secara naluriah, mereka sebenarnya menyadari logika-logika negara Orde Baru dalam menghadapi berbagai bentuk kerusakan. Mereka bukannya tidak mengetahui bahwa dalam pendekatan represif, membuat keonaran dan anarkhi dapat disetarakan dengan tindakan melawan pemerintah, dan oleh karena itu akan dihadapi dengan tindakan tegas aparat keamanan. Namun, kenyataannya mereka begitu tegar menghadapi aparat keamanan, bahkan menganggap sepi ancaman tembak

---

<sup>10</sup> Michel Foucault, "Power/Knowledge : Selected Interviews and Other Writings 1972-1977", diedit oleh Colin Gordon, Pantheon Books, 1980 hal. 82; dikutip dalam George J. Aditjondro, "Pengetahuan-Pengetahuan Lokal Yang Tertindas: Meneropong Gerakan Lingkungan di Indonesia Melalui Konsep "Kuasa/Pengetahuan" Foucault," dalam *Kalam*, edisi 1, 1994, hal. 61.

di tempat yang diutarakan aparat keamanan. Mungkinkah ini merupakan ekspresi kekecewaan mereka terhadap realitas “komersialisasi keamanan” yang selama ini tumbuh subur dalam konteks hubungan “simbiosis mutualisme” antara aparat keamanan dan para pemilik perkebunan, tambak, peternakan atau penggilingan padi? Mungkinkah kaum miskin itu sudah demikian antipati terhadap aparat keamanan yang lebih akomodatif terhadap kepentingan pihak swasta itu daripada terhadap kepentingan dan tuntutan mereka?

Perlu dikembangkan wacana tandingan yang terbentuk oleh kesaksian-kesaksian polos dan “a politis” kalangan miskin yang terlibat penjarahan. Besar kemungkinan wacana tandingan ini justru lebih menggambarkan dinamika konflik dan konteks sosio-historis yang melatar-belakangi aksi penjarahan. Minimal, wacana tandingan itu memberikan perspektif alternatif untuk mengapresiasi dan menganalisis fenomena penjarahan. Harus diakui bahwa dalam memahami fenomena penjarahan, masyarakat cenderung hanyut dalam pola pikir yang telah terkontaminasi perspektif “resmi” negara yang bertumpu pada pendekatan represif dan penegakan status quo. Jika wacana tandingan itu dapat diberdayakan, bisa jadi kebenaran dan keadilan yang menjelajahi setiap entitas konflik antara masyarakat bawah dan negara *vis a vis* tidak lagi menjadi hak “prerogatif” elit kekuasaan.

## Peran Media Massa

Pemberdayaan wacana tandingan tentang aksi penjarahan sangat tergantung pada peranan media massa. Sebab tidak dapat dipungkiri bahwa wacana penjarahan selama ini lebih banyak terbentuk oleh *coverage* media massa terhadap aksi-aksi penjarahan yang terjadi di berbagai daerah. Tidak ada medium alternatif di mana fenomena penjarahan secara ajek diwacanakan seperti halnya dalam media massa. Referensi masyarakat tentang perkembangan aksi penjarahan praktis sangat tergantung pada informasi-informasi yang tersaji dalam presentasi media.

Dalam konteks ini relevan dibicarakan proses-proses *framing* media massa. *Framing* adalah metode penyajian realitas di mana kebenaran tentang suatu realitas tidak diingkari secara total, melainkan dibelokkan secara halus, dengan memberikan sorotan terhadap aspek-aspek tertentu saja, dengan menggunakan

istilah-istilah yang punya konotasi tertentu, dan dengan bantuan foto, karikatur, dan alat ilustrasi lainnya.<sup>11</sup> *Framing* juga dapat dimaknai sebagai tindakan menyeleksi aspek-aspek realitas yang tergambar dalam teks komunikasi dan membuatnya lebih menonjol dari aspek-aspek yang lain, sambil memperkenalkan definisi problem tertentu, interpretasi kausal, dan rekomendasi penanganan terhadap masalah yang sedang dibicarakan.<sup>12</sup>

Proses *framing* berkaitan dengan strategi pengolahan dan penyajian informasi dalam hubungannya dengan rutinitas dan konvensi profesional jurnalistik.<sup>13</sup> Dominasi sebuah *frame*<sup>14</sup> dalam suatu wacana berita bagaimana pun dipengaruhi oleh proses produksi berita di mana terlibat unsur-unsur redaksional : reporter, redaktur, dan lain-lain. Dengan kata lain proses *framing* merupakan bagian yang integral dari proses redaksional media massa dan menempatkan awak media (baca: wartawan) pada posisi strategis.

Awak media dapat menerapkan standart kebenaran, matrik obyektivitas serta batasan-batasan etika tertentu dalam mengolah dan menyuguhkan berita. Awak media juga dapat membatasi atau menafsirkan komentar-komentar sumber berita, serta memberi porsi pemberitaan yang berbeda antara satu sumber berita dengan sumber berita yang lain, serta mengemas suatu wacana berita dengan perspektif, gaya bahasa, retorika, dan *common sense* yang mereka kehendaki.<sup>15</sup> Mereka juga lazim menguraikan gagasannya, menggunakan gaya bahasanya sendiri, menjabarkan skemata interpretasinya sendiri, serta mendistribusikan retorika-retorika untuk meneguhkan keberpihakkan atau kecenderungan tertentu.<sup>16</sup> Untuk menekankan pengaruh

<sup>11</sup> G. J. Aditjondro, "Proses Rekayasa Pemberitaan Masalah lingkungan dalam Pers Indonesia", makalah yang disampaikan pada *Diskusi Panel Menyongsong Dies Natalis UKSW* ke-36 di kampus UKSW Salatiga, 16 November 1992. Hal. 4.

<sup>12</sup> Robert M. Entman, "*Framing*: Toward Clarification of a Fractured Paradigm", dalam *Journal of Communication*, Autumn 1993, hal. 52.

<sup>13</sup> Zhongdang Pan, and Gerald M. Kosicki, "Framing Analysis : An Approach to News Discourse," dalam *Political Communication*, Taylor & Francis, 10, 1993, hal. 57.

<sup>14</sup> *Frame* dapat diidentifikasi sebagai cara bercerita (*story line*) yang menghadirkan konstruksi makna spesifik tentang objek wacana. Lihat W. A. Gamson dan A. Modigliani, "The Changing Culture off Affirmative Action", dalam R.G. Braungart dan M.M. Braungart (ed.), *Research in political Sociology*, 3, CT: JAI Press, Greenwich, 1987.

<sup>15</sup> W. A. Gamson, and A. Modigliani, "Media Discourse and Public Opinion on Nuclear Power : A Constructionist Approach," dalam *American Journal of Sociology*, volume 95 (1), 1989, hal. 3.

<sup>16</sup> *Ibid.*

awak media dalam proses-proses *framing* realitas media, Dorothy Nelkin menyatakan tiga dalil sebagai berikut.

1. *By their selection of newsworthy events, journalists identify pressing issues.*
2. *By their focus on controversial issues, they stimulate demands for accountability.*
3. *By their use of images ("frontiers", "struggles"), they help to create the judgmental biases that underlie public policy."<sup>17</sup>*

Proses *framing* mempunyai implikasi politis yang signifikan. *Framing* dapat menjadi senjata ampuh bagi elit politik untuk melakukan rekayasa opini publik. Dengan mempertajam *frame* tertentu tentang sebuah isu politik, mereka dapat mengklaim bahwa opini publik yang berkembang mendukung kepentingan mereka, atau konvergen dengan "klaim kebenaran" mereka. *Framing* juga dapat berfungsi sebagai bagian dari strategi propaganda politik, seperti dinyatakan oleh Parenty dalam kutipan berikut.

*"The most effective propaganda is that which relies on framing rather than on falsehood. By bending the truth rather than breaking it, using emphasis, nuance, innuendo, and peripheral embellishments, communicators can create a desired impression without resorting to explicit advocacy and without departing too far from the appearance of objectivity."<sup>18</sup>*

Pertanyaan yang perlu diajukan kemudian bagaimana kecenderungan media dalam memberitakan kasus-kasus penjarahan? *Frame* yang bagaimanakah yang dominan dalam wacana media di Indonesia tentang aksi penjarahan?

Dalam memberitakan kasus-kasus penjarahan, kalangan media massa cenderung menonjolkan aspek keluarbiasaan, ketegangan dan konflik dari pada aspek-aspek berita yang lain, seperti signifikansi, akibat, dan kemajuan.<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Dorothy Nelkin, *Selling Science: How the Press Covers Science and Technology*, W.H. Freeman and Co., 1987, hal. 80.

<sup>18</sup> Michael Parenty, *Inventing Reality: The Politics of the Mass Media*, St. Martin's Press, 1986, hal. 220.

<sup>19</sup> Tentang pemilihan aspek berita ini lihat Dja'far H. Assegaff, *Jurnalistik Masa Kini: Pengantar ke Praktek Kewartawanan*, Ghalia Indonesia, 1982, hal. 25-37.

Dalam kasus penebangan kakau di Malang Selatan, wartawan lebih tertarik untuk menyoroti nilai kakau yang sangat tak sebanding dengan nilai jagung daripada menggali penjelasan-penjelasan historis-sosiologis keterkaitan jagung dan kehidupan petani penjarah. Data-data tentang kerugian pihak PTPN XII lebih dahulu terekspos oleh media daripada data-data tentang kerugian penduduk selama perkebunan itu beroperasi. Demikian juga kebrutalan penduduk ketika membabat berhektar-hektar tanaman kakau dibandingkan dengan keangkeran dan sifat tidak bersahabat pegawai-pegawai perkebunan itu terhadap penduduk di sekitarnya. Berita bahwa mandor perkebunan, atas perintah atasannya, sering meneror bahkan melakukan siksaan fisik terhadap penduduk setempat sering dimunculkan belakangan.

Dalam kasus penjarahan penggilingan padi, wartawan lebih tertarik untuk menggambarkan beratus-ratus ton beras yang dijarah dan beratus-ratus penduduk yang terlibat daripada kerugian-kerugian yang diderita masyarakat selama penggilingan padi itu beroperasi. Kerumunan penduduk yang mengacung-acungkan senjata tajam, teriakan-teriakan untuk membakar kompleks penggilingan padi, dan kegaduhan ketika penjarahan terjadi sudah tentu menimbulkan suasana yang menegangkan. Wartawan biasanya lebih tergoda untuk mengekspos suasana ini daripada susah-payah menginvestigasi tingkah laku pemilik penggilingan padi terhadap masyarakat sekitarnya.

Pemberitaan media juga cenderung berhati-hati dalam menggambarkan fakta-fakta tentang perilaku aparat keamanan dalam mengatasi penjarahan petani. Padahal dalam banyak kasus aparat keamanan sangat arogan dan brutal dalam menghadapi aksi-aksi petani, sehingga korban nyawa dari pihak petani tidak dapat dihindari. Namun kenyataannya justru petani penjarah yang selalu diidentifikasi sebagai kelompok yang anakhis, makar dan kriminal.

Aksi penjarahan petani dianggap kontraproduktif dalam konteks negara yang berusaha melakukan *law enforcement* dan dalam konteks pengembangan ekonomi berorientasi ekspor dan investasi asing. Padahal telah lama petani merasakan bagaimana hukum hanya menjadi perangkat bagi orang-orang berkuasa dan orang-orang kaya untuk mengelabui mereka dalam kasus pengambilalihan tanah, perijinan usaha dan pemaksaan menanam kopi dan lain-lain. Industrialisasi pertanian justru menimbulkan dampak-dampak buruk bagi petani, lepasnya tanah warisan leluhur, hilangnya penghidupan dan keselarasan hubungan dengan alam sekitar, dan terancamnya nilai-nilai yang selama ini mereka pertahankan.

Pada akhirnya terlihat bahwa wacana media tentang aksi penjarahan petani cenderung menonjolkan *frame* yang *ilegitimat* tentang petani pelaku penjarah. Penjarahan petani lebih banyak dikonstruksi dalam *frame* kekerasan dan anakhisme sipil, dan bukannya dalam *frame* usaha-usaha petani untuk mengembalikan hak-haknya sebagai warga negara. Penjarahan petani lebih banyak dikonstruksi dalam *frame* pembangkangan masyarakat terhadap negara dan bukannya dalam *frame* demokratisasi dan egalitarianisme hubungan negara-masyarakat.

Suatu aspek yang agaknya kurang terekspos oleh media adalah bahwa aksi-aksi penjarahan itu mencerminkan peningkatan kesadaran politik petani. Artinya petani menjadi sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan sadar bahwa negara bukan institusi yang angker dan tak terjangkau. Negara dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban atas perilakunya selama ini terhadap petani. Jika negara tidak ternyata memperhatikan tuntutan petani, maka petani berhak mengambil inisiatif sendiri. Aksi-aksi penjarahan itu menyadarkan bahwa selama ini negara telah membiarkan, bahkan melestarikan penindasan dan penghisapan dilakukan terhadap petani. Dalam konteks reformasi, keberanian petani melakukan aksi penjarahan, penebangan dan pematokan lahan perkebunan akan menggerakkan kesadaran petani di lain tempat untuk turut mempertanyakan hak-haknya yang telah terampas negara dan para kolega swastanya.

Di sisi lain, kalangan media juga cenderung mendahulukan sumber berita kaum elit, baik elit negara (eksekutif, legislatif dan militer) maupun non-negara (pengamat sosial, intelektual kampus dan pemuka masyarakat). Ketika sebuah penjarahan terjadi, serta merta dalam benak wartawan muncul gagasan untuk mendatangi kantor polisi, pemilik perkebunan atau pemerintah setempat guna menggali informasi, kemudian menghubungi pakar-pakar terkait untuk meminta komentar. Pemberitaan media masih berorientasi pada tokoh, sehingga komentar-komentar kaum elit itulah yang lebih dahulu mewarnai pemberitaan media daripada pengakuan-pengakuan petani pelaku penjarahan.

Dalam konteks inilah dapat terjadi apa yang diistilahkan Aditjondro sebagai tragedi penggusuran kedaulatan rakyat oleh kedaulatan pakar.<sup>20</sup> Kemampuan panca indera dan daya instingtif rakyat dalam merasakan dampak-dampak

---

<sup>20</sup> G. J. Aditjondro, "Pengetahuan-Pengetahuan lokal...", *op. cit.*, hal 63.

### Daftar Pustaka

- Aditjondro, George J. "Pengetahuan-Pengetahuan Lokal yang Tertindas: Meneropong Gerakan Lingkungan di Indonesia melalui Konsep "Kuasa/Pengetahuan" Foucault," dalam *Kalam*, edisi 1, 1994.
- , "Proses Rekayasa Pemberitaan Masalah lingkungan dalam Pers Indonesia", makalah yang disampaikan pada *Diskusi Panel Menyongsong Dies Natalis UKSW ke-36* di kampus UKSW Salatiga, 16 November 1992.
- Eckstein, Susan, (ed.). *Power and Popular Protest : Latin American Social Movement*, Berkeley : University of California Press, 1989.
- Entman, Robert M, "Framing : Toward Clarification of a Fractured Paradigm", dalam *Journal of Communication*, Autumn 1993.
- Foucault, Michel, *Power/Knowledge : Selected Interviews and Other Writings 1972-1977*, diedit oleh Colin Gordon, New York : Pantheon Books, 1980.
- Gamson, William A. dan A. Modigliani, "Media Discourse and Public Opinion on Nuclear Power : A Constructionist Approach," dalam *American Journal of Sociology*, volume 95 (1), 1989.
- Gamson, William. A., and A. Modigliani, "The Changing Culture off Affirmative Action", dalam R.G. Braungart dan M.M. Braungart, ed., *Research in Political Sociology*, 3, CT: JAI Press, Greenwich, 1987.
- Nelkin, Dorothy, *Selling Science : How the Press Covers Science and Technology*, New York : W.H. Freeman and Co., 1987.
- Pan, Zhongdang, and Gerald M. Kosicki. "Framing Analysis : An Approach to News Discourse," dalam *Political Communication*, Taylor & Francis, 10, 1993.
- Panggabean, Rizal, "Peluang Represi Sebagai Solusi Anarki", makalah yang disampaikan dalam *Seminar "Anarki, Represi, dan Demokrasi"* dalam rangka Dies Fisipol UGM 1998, 19 September 1998.
- Parenthy, Michael, *Inventing Reality : The Politics of the Mass Media*, New York : St. Martin's Press, 1986.
- Scott, James C, *Weapons of The Weak : Everyday Forms of Peasant Resistance*, New Haven : Yale University Press, 1985.



Siahaan, Hotman M., “‘Anarki’ Sebagai Upaya Mempertahankan Subsistensi di Pedesaan”, makalah yang disampaikan *Seminar* “Anarki, Represi, dan Demokrasi” dalam rangka Dies Fisipol UGM 1998, 19 September 1998.

van Dijk, Teun A., “Legitimacy,” dalam *Ideology : A Multidisciplinary Study* (London : Sage, 1998, in Press).

Zagoria, Donald, “Asian Tenancy Systems and Communist Mobilizations of Peasantry,” dalam Jhon Lewis ed., *Peasant and Communist Revolutions in Asia*, California : Stanford University Press. 1974.

*Kompas*, 17 Desember 1998.